



**Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Keterbukaan Perdagangan terhadap
Penerimaan Pajak Asean 2014-2024**

The Influence of Inflation, Economic Growth, and Openness on Tax Revenue in ASEAN 2014-2024

Moch Jamilul Irsyadi
222010300109
Heri Widodo
0008097301

SKRIPSI

Program Studi Akuntansi
Fakultas Bisnis, Hukum & Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Juli, 2026

The Influence of Inflation, Economic Growth, and Openness on Tax Revenue in ASEAN 2014-2024

[Pengaruh Inflasi, pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan perdagangan terhadap Penerimaan Pajak Asean 2014-2024]

Moch. Jamilul Irsyadi¹, Heri Widodo²)

¹) Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²) Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: heriwidodo@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the effect of inflation, economic growth, and trade openness on tax revenue in nine ASEAN countries during the period 2014–2024. The research uses a quantitative approach with panel data sourced from the World Development Indicators (World Bank) and the International Monetary Fund (IMF). The analysis is carried out using panel data regression through EViews 12 software by comparing the Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), and Random Effect Model (REM). The test results show that REM is the most suitable model. The findings indicate that inflation does not affect tax revenue, while economic growth and trade openness have a positive effect. This suggests that increased economic activity and international trade can expand the tax base and increase state revenue. Therefore, the government needs to maintain economic growth, strengthen tax administration, expand the tax base, improve taxpayer compliance, and continue fiscal reforms consistently.*

Keywords - tax revenue, inflation, economic growth, trade openness, ASEAN, panel data, REM

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan keterbukaan perdagangan terhadap penerimaan pajak di sembilan negara ASEAN selama periode 2014–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang bersumber dari World Development Indicators (World Bank) dan International Monetary Fund (IMF). Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel melalui perangkat lunak EViews 12 dengan membandingkan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Hasil pengujian menunjukkan bahwa REM merupakan model yang paling sesuai. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan perdagangan berpengaruh positif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi serta perdagangan internasional dapat memperluas basis pemajakan dan meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan melanjutkan reformasi fiskal secara berkesinambungan.*

Kata Kunci – penerimaan pajak, Inflasi, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, ASEAN, Data panel, REM

I. PENDAHULUAN

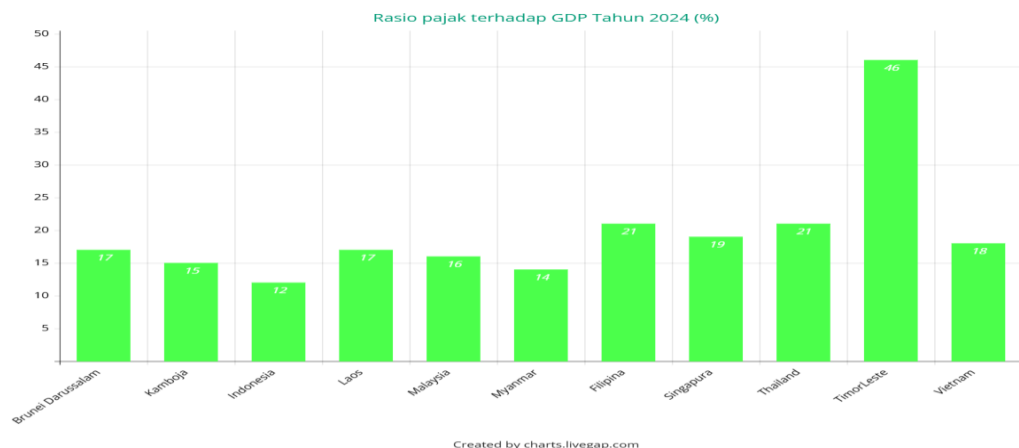
Dalam konteks globalisasi, pendapatan pajak memiliki peran yang semakin strategis sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan serta instrumen untuk menjaga stabilitas fiskal [1]. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh negara tanpa imbalan langsung kepada pembayar, dan kinerjanya sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi serta perumusan kebijakan fiskal [2]. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak, peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak, serta pengelolaan pengeluaran publik yang lebih efisien dan terarah [3]. Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan perdagangan terhadap penerimaan pajak di negara-negara ASEAN selama periode 2014–2024 [4]

Negara-negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam, memiliki posisi strategis dalam perekonomian global sebagai basis manufaktur dan pusat perdagangan internasional. Dalam konteks ini, stabilitas makroekonomi khususnya inflasi menjadi faktor fundamental yang memengaruhi daya beli, biaya produksi, serta keberlanjutan basis pajak di kawasan tersebut [5]. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di negara-negara ASEAN berperan dalam memperluas aktivitas ekonomi dan kapasitas fiskal, meskipun rata-rata rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) di sebagian besar negara ASEAN masih berada di bawah rata-rata kawasan Asia-Pasifik [6], yang mengindikasikan adanya ruang yang signifikan untuk peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak. Di sisi lain, keterbukaan perdagangan yang didorong oleh inisiatif integrasi ekonomi seperti Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) serta berbagai perjanjian ekonomi regional lainnya turut membentuk dinamika penerimaan pajak melalui arus barang, jasa, dan investasi lintas negara. Kondisi

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

ini menegaskan urgensi untuk mengkaji peran inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan keterbukaan perdagangan dalam menjelaskan variasi penerimaan pajak antarnegara di kawasan ASEAN [7].



Gambar 1. Rasio Pajak Terhadap GDP

Sumber: Diolah dari IMF (WoRLD), 2026 [8]

Berdasarkan Gambar 1, rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) di negara-negara ASEAN pada tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan, dengan Timor-Leste mencatat rasio penerimaan pajak tertinggi sebesar 46,47% dari PDB pada tahun 2024, jauh melampaui negara ASEAN lainnya. Kelompok dengan rasio penerimaan pajak relatif tinggi meliputi Filipina (21,21%), Thailand (21,2%), Singapura (19,23%), Vietnam (18,43%),

dan Laos (17,99%). Sementara itu, Brunei Darussalam (17,1%), Malaysia (16,67%), Kamboja (15,19%), dan Myanmar (14,92%) berada pada tingkat menengah. Indonesia mencatat rasio penerimaan pajak terendah sebesar 12,84% dari PDB pada tahun tersebut [8]. Variasi ini mencerminkan adanya heterogenitas dalam kapasitas pemungutan pajak antarnegara, sehingga penguatan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, serta peningkatan tingkat kepatuhan termasuk upaya penanggulangan penghindaran dan pengelakan pajak perlu menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan fiskal [9].

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang berkaitan dengan stabilitas penerimaan pajak di negara-negara ASEAN. Secara umum, inflasi menggambarkan kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara berkelanjutan sehingga menyebabkan daya beli masyarakat dan nilai uang menurun. Pada tahun 2024, tingkat inflasi di kawasan ASEAN memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok di setiap negara. Myanmar mencatat inflasi tertinggi sebesar 29,6%, diikuti Laos sebesar 23,1%. Selanjutnya, Singapura (4,8%), Vietnam (3,6%), dan Filipina (3,2%) berada pada kelompok negara dengan tingkat inflasi menengah. Sementara itu, Indonesia (2,3%), Timor-Leste (2,1%), Malaysia (1,8%), Kamboja (0,8%), dan Thailand (0,4%) memiliki tingkat inflasi yang relatif rendah. Berbeda dengan negara-negara tersebut, Brunei Darussalam mengalami deflasi sebesar -0,4%, yang menunjukkan adanya penurunan harga barang dan jasa secara umum. Perbedaan kondisi inflasi ini mencerminkan bahwa stabilitas harga di setiap negara ASEAN tidak sama. Variasi tersebut dapat memengaruhi aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena kenaikan harga meningkatkan nilai nominal transaksi dan memperluas basis pemajakan [4], mendorong bracket creep pada sistem pajak progresif [10], memperbesar dasar pengenaan PPN dan pajak konsumsi [11], serta berkorelasi positif dengan tax effort di negara-negara Asia [12]. Namun, inflasi yang tinggi juga dapat berpengaruh negatif apabila terjadi erosi nilai riil penerimaan akibat jeda waktu pemungutan pajak yang dikenal sebagai efek Tanzi-Olivera [13], sehingga hubungan antara inflasi dan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat inflasi serta efektivitas administrasi perpajakan masing-masing negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat memengaruhi besarnya penerimaan pajak di negara-negara ASEAN. Indikator ini umumnya diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dari tahun ke tahun. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin meningkat pula aktivitas produksi, pendapatan masyarakat, konsumsi, serta keuntungan dunia usaha. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memperluas basis pemajakan sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN menunjukkan variasi yang cukup beragam di setiap negara. Vietnam mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7%, disusul Kamboja (6%), Filipina (5,7%), Singapura (5,3%), Malaysia (5,1%), dan Indonesia (5%). Laos dan Timor-Leste masing-masing tumbuh sebesar 4,3%, kemudian Brunei Darussalam sebesar 4,1%, serta Thailand sebesar 2,9%. Sementara itu, Myanmar mengalami kontraksi ekonomi sebesar -1%, yang berarti aktivitas

ekonominya mengalami penurunan pada tahun tersebut. Perbedaan pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi setiap negara ASEAN tidak sama, sehingga potensi penerimaan pajaknya juga dapat berbeda. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena peningkatan output dan pendapatan nasional secara langsung memperluas basis pemajakan melalui kenaikan konsumsi, laba perusahaan, dan pendapatan rumah tangga [14], mendorong peningkatan rasio pajak terhadap PDB melalui perluasan sektor formal [15], memperkuat kapasitas fiskal negara dalam menghimpun penerimaan dari berbagai jenis pajak [16], serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak seiring membaiknya kondisi ekonomi secara keseluruhan [13]. Namun, pertumbuhan ekonomi juga dapat berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak apabila ekspansi ekonomi didominasi oleh sektor informal yang sulit dijangkau oleh sistem perpajakan, sehingga potensi penerimaan tidak sepenuhnya terealisasi meskipun aktivitas ekonomi meningkat [17], yang menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan kualitas tata kelola fiskal masing-masing negara.

Keterbukaan perdagangan menggambarkan seberapa besar aktivitas ekspor dan impor berperan dalam perekonomian suatu negara. Pengukuran ini dilihat dari rasio perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin tinggi nilainya, semakin besar keterlibatan negara tersebut dalam perdagangan internasional. Kondisi ini juga dapat memengaruhi penerimaan pajak melalui bea masuk, pajak impor, pajak perusahaan, serta aktivitas perdagangan dan distribusi barang antarnegara. Data tahun 2024 menunjukkan tingkat keterbukaan perdagangan di negara-negara ASEAN cukup berbeda. Singapura menjadi negara dengan rasio perdagangan tertinggi sebesar 322,37% dari PDB. Setelah itu terdapat Vietnam (173,86%), Kamboja (143,45%), Malaysia (137,36%), Thailand (136,75%), dan Brunei Darussalam (132,59%). Timor-Leste mencatat rasio sebesar 95,45%, sedangkan Filipina (65,89%) dan Indonesia (42,57%) memiliki tingkat keterbukaan perdagangan yang lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya. Perbedaan nilai keterbukaan perdagangan tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan setiap negara ASEAN terhadap perdagangan internasional masih bervariasi. Sementara itu, data keterbukaan perdagangan Laos dan Myanmar untuk tahun 2024 tidak tersedia (no data). Variasi tersebut mencerminkan bahwa tingkat integrasi ekonomi masing-masing negara dengan pasar global belum sama, sehingga potensi pengaruh perdagangan internasional terhadap aktivitas ekonomi maupun kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak juga dapat berbeda. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena peningkatan aktivitas ekspor dan impor memperluas basis pemajakan melalui bea masuk, PPN impor, serta pajak atas laba dari sektor yang terintegrasi dengan pasar global [16], mendorong peningkatan penerimaan pajak perdagangan internasional seiring meningkatnya volume transaksi lintas negara [18], memperkuat kapasitas fiskal melalui diversifikasi sumber penerimaan dari sektor eksternal [19], serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui adopsi standar dan praktik perpajakan internasional [20]. Namun, keterbukaan perdagangan juga dapat berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak apabila liberalisasi perdagangan mendorong penurunan tarif bea masuk tanpa diimbangi penguatan pajak domestik, atau apabila praktik transfer pricing dan penghindaran pajak dalam transaksi lintas negara semakin menggerus potensi penerimaan [17], sehingga hubungan antara keterbukaan perdagangan dan penerimaan pajak sangat bergantung pada struktur ekonomi, kapasitas administrasi perpajakan, serta tingkat integrasi ekonomi masing-masing negara.

Teori Keynesian memandang bahwa kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak pada periode jangka pendek hingga menengah berkaitan erat dengan kondisi permintaan agregat dan stabilitas perekonomian [21]. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi, pendapatan masyarakat, serta keuntungan dunia usaha yang pada akhirnya memperluas basis pemungutan pajak. Di sisi lain, inflasi memengaruhi besarnya penerimaan pajak melalui perubahan daya beli dan nilai riil penerimaan tersebut. Tingkat inflasi yang relatif terkendali dapat meningkatkan penerimaan pajak secara nominal, sedangkan inflasi yang terlalu tinggi berpotensi menurunkan nilai riil penerimaan pajak sekaligus melemahkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, keterbukaan perdagangan menunjukkan tingkat keterhubungan suatu negara dengan perekonomian global melalui kegiatan ekspor dan impor. Semakin tinggi intensitas perdagangan internasional, semakin besar peluang terciptanya aktivitas ekonomi yang mampu memperluas sumber penerimaan negara, baik melalui pajak perdagangan, PPN impor, maupun pajak yang berasal dari aktivitas ekonomi lainnya. Pada negara-negara ASEAN selama periode 2014–2024, perbedaan tingkat keterbukaan ekonomi dan karakteristik struktur ekonomi menyebabkan pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta keterbukaan perdagangan terhadap kapasitas fiskal setiap negara tidak selalu sama. Oleh karena itu, teori Keynesian menjadi dasar yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax to GDP), karena menekankan peran permintaan agregat, stabilitas harga, dan integrasi perdagangan internasional dalam membentuk kemampuan pemerintah menghimpun penerimaan pajak [22].

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh inflasi dan keterbukaan perdagangan terhadap penerimaan pajak di negara-negara ASEAN pada periode 1991–2020 [10]. Penelitian tersebut belum memasukkan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi penerimaan pajak serta belum mencakup dinamika ekonomi terbaru pada periode 2021–2024. Selain itu, penelitian ini juga memperluas cakupan objek dengan memasukkan Timor-Leste dalam analisis kawasan ASEAN. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan penelitian terdahulu dengan menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi serta

menggunakan periode pengamatan 2014-2024, sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN [10]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan keterbukaan perdagangan terhadap penerimaan pajak di negara-negara ASEAN [10]. Studi ini menggunakan data panel tahunan periode 2014–2024 dengan seluruh indikator dinyatakan dalam persentase produk domestik bruto (PDB) guna memastikan keterbandingan lintas negara [4]. Inflasi merepresentasikan stabilitas harga yang memengaruhi nilai riil dan efektivitas penerimaan pajak, sementara pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi yang berpotensi memperluas basis pemajakan. Keterbukaan perdagangan, yang ditangkap melalui rasio perdagangan terhadap PDB, menggambarkan intensitas interaksi ekonomi dengan sektor eksternal yang relevan bagi pembentukan penerimaan pajak dari aktivitas ekspor dan impor. Analisis difokuskan untuk menilai sejauh mana ketiga variabel tersebut memengaruhi kapasitas penerimaan pajak di kawasan ASEAN. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang mendukung perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif dalam meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB di negara-negara ASEAN [6].

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam perspektif Keynesian, inflasi dipahami sebagai konsekuensi dari dinamika permintaan agregat yang dapat memengaruhi kinerja fiskal pemerintah. Inflasi dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena kenaikan harga meningkatkan nilai nominal transaksi, pendapatan, dan laba yang menjadi dasar pengenaan pajak [4] [10]. Peningkatan nilai nominal tersebut pada akhirnya memperluas basis pemajakan dan mendorong peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu, hubungan antara inflasi dan penerimaan pajak menunjukkan kecenderungan positif, terutama dalam kondisi di mana sistem perpajakan mampu menyesuaikan terhadap perubahan harga.

H1: Inflasi Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam perspektif Keynesian, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai hasil dari peningkatan permintaan agregat yang mendorong ekspansi output dan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena peningkatan output dan pendapatan akan memperluas basis pemajakan melalui kenaikan konsumsi, laba perusahaan, serta pendapatan rumah tangga yang menjadi objek pajak [14], [15]. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut pada akhirnya mendorong peningkatan kapasitas fiskal negara melalui optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak menunjukkan kecenderungan positif, terutama dalam kondisi di mana sistem perpajakan berjalan secara efektif.

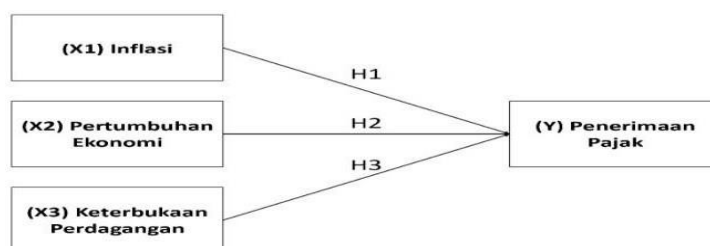
H2: Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Pengaruh Keterbukaan Perdagangan Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam perspektif Keynesian, keterbukaan perdagangan dipahami sebagai bagian dari komponen ekspor neto dalam permintaan agregat yang memengaruhi tingkat output dan aktivitas ekonomi domestik. Keterbukaan perdagangan dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena peningkatan aktivitas ekspor dan impor memperluas basis pemajakan melalui pajak perdagangan internasional, pajak pertambahan nilai impor, serta peningkatan laba dan pendapatan dari sektor yang terintegrasi dengan pasar global [13], [23]. Peningkatan aktivitas perdagangan tersebut pada akhirnya mendorong peningkatan kapasitas fiskal negara melalui optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, hubungan antara keterbukaan perdagangan dan penerimaan pajak menunjukkan kecenderungan positif, terutama dalam kondisi di mana sistem perpajakan dan administrasi fiskal berjalan secara efektif.

H3: Keterbukaan Perdagangan Berpengaruh positif Terhadap Penerimaan Pajak

Kerangka Konseptual



Gambar 2. Kerangka Konseptual

II. METODE

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada pengolahan data dalam bentuk angka serta analisis statistik untuk menguji hubungan antarvariabel secara objektif dan terukur. Data yang dianalisis berupa data numerik berupa tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, dan penerimaan pajak pada negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations selama periode 2014–2024. Data tersebut kemudian diolah menggunakan teknik statistik dan model ekonometrika untuk menguji hubungan serta mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap penerimaan pajak secara empiris dan terukur [24].

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu sehingga dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan disusun dalam bentuk data panel tahunan (country–year) untuk negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) selama periode 2014–2024, di mana setiap unit observasi merepresentasikan satu negara dalam satu tahun tertentu. Penggunaan desain data panel dipilih karena mampu mengombinasikan dimensi lintas negara (cross-section) dan dimensi runtut waktu (time-series), sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dalam menggambarkan dinamika variabel penelitian pada negara-negara ASEAN selama periode pengamatan [4].

Sumber data utama diperoleh dari dua portal resmi internasional, yaitu International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan pajak yang diukur sebagai persentase terhadap Produk Domestik Bruto (tax revenue, %GDP) [11]. Adapun variabel independen meliputi inflasi yang diprosikan melalui pertumbuhan harga tahunan (%yoy), pertumbuhan ekonomi riil yang diukur dengan real GDP growth (%yoy) [25], serta keterbukaan perdagangan yang direpresentasikan melalui pertumbuhan ekspor dan impor barang dan jasa (%yoy) [16]. Seluruh variabel dinyatakan dalam bentuk persentase tahunan atau persentase terhadap PDB untuk memastikan keterbandingan antarnegara ASEAN dan antarperiode waktu. Sebelum dilakukan estimasi regresi data panel pada periode 2014 - 2024, dilakukan penyesuaian satuan, harmonisasi rentang waktu observasi, serta uji konsistensi data guna menjamin validitas dan reliabilitas hasil analisis empiris.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh negara anggota Association of Southeast Asian Nations, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste dan Vietnam. Kesebelas negara tersebut menjadi cakupan analisis lintas negara dalam penelitian ini. Pemilihan seluruh anggota ASEAN sebagai populasi didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan ini memiliki tingkat integrasi ekonomi dan koordinasi kebijakan regional yang cukup kuat, namun tetap menunjukkan perbedaan struktur ekonomi, kapasitas fiskal, dan tingkat keterbukaan perdagangan. Variasi tersebut memberikan ruang analitis yang memadai untuk mengidentifikasi perbedaan penerimaan pajak antar negara [4]. Secara konseptual, unit observasi penelitian adalah negara, sedangkan dalam pengolahan data unit analisisnya berbentuk negara - tahun (country - year) selama periode penelitian. Dengan menetapkan seluruh negara anggota ASEAN sebagai populasi, penelitian ini memperoleh cakupan yang komprehensif dalam menilai pengaruh faktor makroekonomi, fiskal, dan keterbukaan perdagangan terhadap penerimaan pajak di tingkat kawasan [26].

Tabel 1. Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
Negara ASEAN	11
Negara ASEAN yang tidak memiliki data lengkap Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Penerimaan Pajak ASEAN 2014-2024	2
Negara ASEAN yang memiliki data lengkap Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Penerimaan Pajak ASEAN 2014-2024	9
Sampel terpilih	9
Periode penelitian 2014-2024	11
Total Sampel	99

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dalam penelitian ini menjabarkan konsep menjadi variabel yang dapat diamati dan diukur sesuai tujuan studi. Mengacu pada judul, variabel dibagi menjadi variabel independent Inflasi (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2), Keterbukaan perdagangan (X3) serta variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak (Y). Cakupan

observasi adalah negara-negara ASEAN dengan unit negara–tahun pada periode 2014–2024 [28].

Penelitian ini menggunakan empat variabel yang diukur secara kuantitatif. Inflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan terus-menerus dalam suatu periode waktu, sehingga daya beli uang menjadi menurun, Inflasi (X1) diukur menggunakan GDP Deflator, yang dihitung dengan membandingkan GDP Deflator tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya dikurangi satu dan dikalikan 100, sehingga mencerminkan perubahan tingkat harga secara keseluruhan dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu, yang biasanya diukur melalui kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB), Pertumbuhan ekonomi (X2) diukur melalui pertumbuhan GDP riil, yaitu selisih antara GDP riil tahun berjalan dan tahun sebelumnya dibagi GDP riil tahun sebelumnya dan dikalikan 100, yang menggambarkan laju ekspansi output perekonomian secara nyata. Keterbukaan perdagangan adalah kondisi di mana suatu negara membuka diri terhadap aktivitas perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor, dengan meminimalkan hambatan seperti tarif dan kuota, Keterbukaan perdagangan (X3) diukur dengan menjumlahkan nilai ekspor dan impor kemudian dibagi dengan GDP dan dikalikan 100, yang mencerminkan seberapa besar suatu negara terintegrasi dengan perekonomian global. Adapun penerimaan pajak (Y) sebagai variabel dependen diukur melalui rasio tax revenue terhadap GDP dikalikan 100, yang menunjukkan kapasitas fiskal pemerintah dalam memobilisasi pendapatan pajak relatif terhadap ukuran perekonomian.

Tabel 2. Pengukuran Oprasional Variabel

Variabel	Operasionalisasi/ Rumus	Satuan	Sumber
Inflasi (X1)	$(CPI_t - CPI_{t-1}) / CPI_{t-1} \times 100$	Rasio	[10], [11]
Pertumbuhan Ekonomi (X2)	$(GDP_t - GDP_{t-1}) / GDP_{t-1} \times 100$	Rasio	[14], [25]
Keterbukaan Perdagangan (X3)	EKSPOR + IMPOR	Rasio	[16], [18]
Penerimaan Pajak (Y)	Tax revenue / GDP x 100	Rasio	[8], [9]

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 13. Regresi data panel merupakan metode ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antarvariabel dengan memanfaatkan data yang memiliki dimensi lintas unit (cross-section) dan runtut waktu (time-series). Tahapan analisis diawali dengan pemilihan model terbaik melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Setelah model yang sesuai ditentukan pengujian asumsi klasik Ordinary Least Squares (OLS). Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t secara parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, serta analisis koefisien determinasi (R^2 dan Adjusted R^2) guna mengukur sejauh mana variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi panel [29].

1. Uji Pemilihan Model (CEM, FEM, REM).

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai dengan mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik yang tidak teramati antar unit maupun periode waktu. Common Effect Model (CEM) atau pooled OLS mengasumsikan bahwa nilai intercept dan slope adalah sama untuk seluruh unit observasi dan periode penelitian. Fixed Effects Model (FEM) memungkinkan adanya perbedaan nilai intercept pada setiap unit atau waktu sehingga dapat mengontrol heterogenitas yang mungkin berkorelasi dengan variabel independen. Sementara itu, Random Effects Model (REM) menganggap perbedaan intercept sebagai komponen acak yang tidak berkorelasi dengan variabel penjelas, sehingga model ini dapat memberikan estimasi yang lebih efisien apabila asumsi yang mendasarinya terpenuhi [30].

Tabel 3. Uji Pemilihan Model

Pengujian	Hasil	Keputusan
Uji Chow	Prob. > 0,05 Prob. < 0,05	CEM FEM
Uji Hausman	Prob. > 0,05 Prob. < 0,05	REM FEM
Uji Lagranger Multiplier	Prob. > 0,05 Prob. < 0,05	CEM REM

a) Uji Chow (CEM vs FEM).

H_0 : model pooled (CEM) sudah memadai; tidak diperlukan efek tetap. H_1 : model efek tetap (FEM) diperlukan.

Keputusan: jika $p \geq 0,05 \rightarrow H_0$ diterima (gagal menolak H_0) $\rightarrow$ pilih CEM. Jika $p < 0,05 \rightarrow H_0$ ditolak dan H_1

diterima → pilih FEM.

b) Uji Hausman (REM vs FEM).

H_0 : model efek acak (REM) valid/konsisten; tidak ada korelasi antara efek individual dan variabel penjelas. H_1 : model efek tetap (FEM) yang valid; ada korelasi sehingga REM tidak konsisten. Keputusan: jika $p \geq 0,05$ → H_0 diterima → pilih REM. Jika $p < 0,05$ → H_0 ditolak dan H_1 diterima → pilih FEM

c) Uji Lagrange Multiplier / LM Breusch–Pagan (CEM vs REM). H_0 :

tidak ada efek acak (varian efek = 0); CEM memadai.

H_1 : ada efek acak; REM lebih tepat.

Keputusan: jika $p \geq 0,05$ → H_0 diterima → pilih CEM. Jika $p < 0,05$ → H_0 ditolak dan H_1 diterima → pilih REM.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahapan penting yang harus dipenuhi ketika analisis regresi dilakukan menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS). Pelaksanaan pengujian asumsi ini bergantung pada model regresi data panel yang dipilih dalam proses estimasi. Apabila model yang digunakan adalah Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM) yang berbasis OLS, maka pengujian asumsi klasik tetap perlu dilakukan. Namun, jika model yang terpilih adalah Random Effect Model (REM), pengujian asumsi klasik umumnya tidak dilakukan karena REM menggunakan pendekatan estimasi Generalized Least Squares (GLS). Secara umum, pengujian asumsi klasik dalam analisis regresi meliputi beberapa jenis pengujian, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi [30].

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis didasarkan pada nilai p-value, di mana jika p-value $< 0,05$ maka variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika p-value $\geq 0,05$ maka variabel tersebut dinyatakan tidak berpengaruh. Dalam pelaporan hasil analisis, ditampilkan nilai absolut t-statistic ($|t|$) serta p-value dari masing-masing variabel. Selain itu, tingkat kesesuaian model juga dievaluasi melalui nilai R^2 dan Adjusted R^2 , yang menunjukkan seberapa besar proporsi variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi yang digunakan [30].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pemilihan

1. Uji Pemilihan Model

Uji pemilihan model digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai.

a) Uji Chow

Tabel 4. Uji Chow

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/30/26 Time: 00:11				
Sample: 2014 2024				
Periods included: 11				
Cross-sections included: 9				
Total panel (balanced) observations: 99				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2751.132	345.2967	7.967444	0.0000
X1	-13.63130	89.06112	-0.153056	0.8787
X2	-125.1832	52.98065	-2.362811	0.0204
X3	-2.089438	1.708406	-1.223033	0.2247

Sumber: DiolahEviews 13(2026)

Nilai prob 0,0000 $< 0,05$, maka yang terpilih adalah model FEM

b) Uji Hausman

Tabel 5. Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	3.112927	3	0.3745

Sumber: DiolahEviews 13(2026)

Nilai prob 0.3745 > 0,05, maka yang terpilih adalah model REM

c) Uji Lagrange Multiplier

Tabel 6. Uji Lagrange
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	165.3812 (0.0000)	1.281932 (0.2575)	166.6631 (0.0000)
Honda	12.86006 (0.0000)	-1.132224 (0.8712)	8.292832 (0.0000)
King-Wu	12.86006 (0.0000)	-1.132224 (0.8712)	8.830507 (0.0000)
Standardized Honda	15.31263 (0.0000)	-0.880652 (0.8107)	6.412204 (0.0000)
Standardized King-Wu	15.31263 (0.0000)	-0.880652 (0.8107)	7.080741 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	165.3812 (0.0000)

Sumber: DiolahEviews 13(2026)

Nilai prob 0.0000 < 0,05, maka yang terpilih adalah model REM

Berdasarkan *uji chow*, *uji hausman* dan *uji lagrange multiplier* yang telah dilakukan, hasilnya adalah 1 FEM dan 2 REM, sehingga model yang terpilih adalah REM.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini tidak dilakukan pengujian asumsi klasik karena model regresi data panel yang terpilih adalah Random Effect Model (REM) [31]. menjelaskan bahwa estimasi pada model REM menggunakan metode Generalized Least Squares (GLS), [30] sedangkan Common Effect Model (CEM) maupun Fixed Effect Model (FEM) diestimasi dengan Ordinary Least Squares (OLS). Keunggulan GLS adalah mampu mengatasi masalah

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

heteroskedastisitas maupun autokorelasi sehingga tidak mengharuskan pemenuhan asumsi klasik. Hal serupa ditegaskan oleh Melati & Suryowati (2018) yang menyatakan bahwa pada model REM tidak diperlukan uji asumsi klasik karena secara teoritis pendekatan GLS sudah memperhitungkan perbedaan error [32]. Dengan demikian, pengujian asumsi klasik hanya relevan apabila model yang digunakan adalah CEM atau FEM [33].

3. Uji Hipotesis

1. Ujit (Parsial) Model Random Effects (Panel EGLS)

Table 7. Hasil Uji t

Variabel	t	p-value	Keputusan ($\alpha=5\%$)
X1	-0.119715	0.9050	Tidak berpengaruh
X2	1.891131	0.0417	Berpengaruh
X3	2.799245	0.0062	Berpengaruh

a. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa inflasi (X1) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dinegara-negara ASEAN periode 2014–2024, yang ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar $0,9050 > 0,05$. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak ditolak.

b. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (X2) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di negara-negara ASEAN periode 2014–2024, dengan p-value sebesar $0,0417 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak diterima.

c. Pengaruh Keterbukaan Perdagangan terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan (X3) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di negara-negara ASEAN periode 2014–2024, yang ditunjukkan oleh p-value sebesar $0,0062 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh terhadap penerimaan pajak diterima.

2. Hasil Uji R^2

Tabel 8. Hasil Uji R^2

R-squared	0.074512
Adjusted R-squared	0.045286
S.E. of regression	1279.811
F-statistic	2.549506
Prob(F-statistic)	0.060332

Sumber: DiolahEviews 13(2026)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, diperoleh nilai R-squared sebesar 0,074512, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 7,45%, sedangkan 92,55% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Sementara itu, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,045286 mengindikasikan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen dan jumlah observasi, kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen menjadi sebesar 4,53%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan perubahan penerimaan pajak relatif rendah.

B. Pembahasan

Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat inflasi belum menjadi faktor yang menentukan naik atau turunnya penerimaan pajak di negara-negara ASEAN selama periode penelitian. Artinya, baik ketika inflasi meningkat maupun menurun, kondisi tersebut belum secara langsung memengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Hal ini diduga karena sebagian besar negara ASEAN berhasil menjaga inflasi pada tingkat yang relatif terkendali, sehingga fluktuasi harga yang terjadi belum cukup besar untuk memberikan pengaruh terhadap rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax to GDP). Temuan ini sejalan dengan pendekatan Keynesian [21], yang menjelaskan bahwa inflasi hanya akan memengaruhi penerimaan pajak apabila perubahan harga mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan memperluas basis pemajakan. Ketika inflasi berada pada tingkat yang terkendali, pengaruhnya terhadap penerimaan pajak cenderung tidak signifikan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian [13] yang menyimpulkan bahwa inflasi

tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian [4] yang menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan karena penelitian ini menggunakan indikator penerimaan pajak dalam bentuk *tax to GDP*. Ketika inflasi meningkat, nilai penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto dapat meningkat secara bersamaan sehingga perubahan rasio *tax to GDP* menjadi tidak signifikan.

Pengaruh pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi mampu memperluas basis pemajakan melalui meningkatnya pendapatan masyarakat, keuntungan perusahaan, konsumsi, serta aktivitas produksi. Dengan demikian, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat dihimpun pemerintah. Temuan ini sejalan dengan pendekatan Keynesian [21], yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan agregat, mendorong aktivitas produksi dan investasi, serta memperluas objek dan subjek pajak sehingga penerimaan pajak cenderung meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga mencerminkan meningkatnya kapasitas ekonomi suatu negara dalam menghasilkan pendapatan yang dapat dikenakan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian [14] yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian [17] yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara-negara ASEAN mampu meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga basis pemajakan menjadi lebih luas dan berdampak positif terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Keterbukaan Perdagangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa meningkatnya intensitas perdagangan internasional mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak melalui bertambahnya aktivitas ekspor dan impor, meningkatnya kegiatan ekonomi lintas negara, serta semakin luasnya objek pemajakan yang berasal dari perdagangan internasional. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat keterbukaan perdagangan suatu negara, semakin besar pula peluang pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Temuan ini sejalan dengan pendekatan Keynesian [21], yang menjelaskan bahwa keterbukaan perdagangan dapat mendorong permintaan agregat, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta memperluas basis pemajakan melalui transaksi perdagangan internasional. Selain itu, peningkatan volume perdagangan juga berpotensi meningkatkan penerimaan dari bea masuk, PPN impor, serta pajak yang timbul dari aktivitas ekonomi yang berkembang akibat perdagangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian [16] yang menyimpulkan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian [17] yang menyimpulkan bahwa keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dampak keterbukaan perdagangan terhadap penerimaan pajak bergantung pada sejauh mana peningkatan aktivitas perdagangan mampu memperluas basis pemajakan. Dalam penelitian ini, meningkatnya keterbukaan perdagangan di negara-negara ASEAN mampu mendorong aktivitas ekonomi dan memperluas objek pemajakan, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN selama periode 2014–2024 lebih banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan perdagangan daripada tingkat inflasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas ekonomi serta semakin luasnya arus perdagangan internasional berkontribusi terhadap perluasan basis pemajakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempertahankan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang mendukung peningkatan daya saing. Di sisi lain, upaya optimalisasi penerimaan pajak juga perlu disertai dengan penguatan administrasi perpajakan dan menjaga stabilitas ekonomi agar efektivitas kebijakan fiskal tetap terpelihara.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, periode pengamatan hanya mencakup tahun 2014–2024 dengan jumlah sampel yang terbatas pada beberapa negara ASEAN sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya dapat menggambarkan kondisi di kawasan lain maupun dalam periode yang lebih panjang. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan keterbukaan perdagangan sebagai faktor yang memengaruhi penerimaan pajak, sehingga masih terdapat kemungkinan adanya variabel lain yang turut berpengaruh namun belum dimasukkan ke dalam model penelitian. Ketiga, metode analisis yang digunakan belum mempertimbangkan hubungan dinamis atau pengaruh jangka panjang antarvariabel, sehingga hasil yang diperoleh lebih menggambarkan hubungan pada periode penelitian. Keempat penelitian ini menggunakan penerimaan pajak secara agregat sehingga belum dapat

menjelaskan pengaruh masing-masing variabel terhadap jenis pajak tertentu, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun pajak perdagangan internasional. Oleh karena itu, keterbatasan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam.

Saran Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya disarankan memperpanjang periode pengamatan dan menambah jumlah negara sampel agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik.
2. Peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penerimaan pajak, seperti kualitas institusi, tingkat kepatuhan pajak, ukuran sektor informal, digitalisasi administrasi perpajakan, maupun tingkat korupsi.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan metodologi yang lebih komprehensif, seperti model panel dinamis atau memasukkan efek lag untuk melihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang antarvariabel.
4. Penelitian berikutnya juga disarankan membedakan jenis penerimaan pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak perdagangan internasional sehingga hasil analisis menjadi lebih spesifik.

REFERENSI

- [1] *Fiscal Monitor, April 2025*. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2025. doi: 10.5089/9798229002516.089.
- [2] *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2025*. in Revenue Statistics in Asia and the Pacific. OECD Publishing, 2025. doi: 10.1787/6c04402f-en.
- [3] C. Bauer *et al.*, “WU International Taxation Research Paper Series The Impact of Tax Audits on Compliance Dynamics in a Developing Economy.”
- [4] R. Thath, “The Determinants of Tax Revenue in Southeast Asia: The Role of Government Effectiveness and Human Development,” *Journal of Accounting, Finance, Economics, and Social Sciences*, vol. 9, no. 2, pp. 15–28, Dec. 2024, doi: 10.62458/jafess922.
- [5] “ASEAN Free Trade Area (AFTA) Legal Text”.
- [6] *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024*. in Revenue Statistics in Asia and the Pacific. OECD Publishing, 2024. doi: 10.1787/e4681bfa-en.
- [7] N. Minh Ha, P. Tan Minh, and Q. M. Q. Binh, “The determinants of tax revenue: A study of Southeast Asia,” *Cogent Economics and Finance*, vol. 10, no. 1, 2022, doi: 10.1080/23322039.2022.2026660.
- [8] “TAX REVENUE IMF WORLD REVENUE LONGITUDINAL DATABASE.” Accessed: Feb. 06, 2026. [Online]. Available: <https://www.imf.org/en/topics/fiscal-policies/world-revenue-longitudinal-database>
- [9] T. Bharati, M. Jetter, and M. N. Malik, “Types of communications technology and civil conflict,” *J. Dev. Econ.*, vol. 170, Sep. 2024, doi: 10.1016/j.jdeveco.2024.103312.
- [10] M. T. Bui, H. T. Ngo, G. T. C. Nguyen, and H. N. Duong, “Tax Revenue in ASEAN: Impact Factors and Policy Recommendations,” *Global Business and Finance Review*, vol. 29, no. 6, pp. 158–169, 2024, doi: 10.17549/gbfr.2024.29.6.158.
- [11] “Inflation rate, average consumer prices Annual percent change, <https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/IDN/BRN/KHM/LAO/MYS/MMR/PHL/SGP/THA/VNM>.”
- [12] P. Kena, P. Terhadap, P. Pajak, P. Nilai, T. Sinambela, and S. Rahmawati, “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah.”
- [13] J. Đurović Todorović, M. Đorđević, V. Mirović, B. Kalaš, and N. Pavlović, “Modeling Tax Revenue Determinants: The Case of Visegrad Group Countries,” *Economies*, vol. 12, no. 6, Jun. 2024, doi: 10.3390/economies12060131.
- [14] A. Cornevin, J. S. Corrales, J. Pablo, and A. Mojica, “Do tax revenues track economic growth? Comparing panel data estimators A R T I C L E I N F O,” 2024, doi: 10.17632/dyspdz.
- [15] “KETERBUKAAN PERDAGANGAN PADA PENDAPATAN PER KAPITA DAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI ASEAN”.
- [16] “Trade (% of GDP) <https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS>.”
- [17] M. G. Chamisa and T. Sunde, “Key determinants of tax revenue in Zimbabwe: assessment using autoregressive distributed lag (ARDL) approach,” *Cogent Economics and Finance*, vol. 12, no. 1, 2024, doi: 10.1080/23322039.2024.2386130.
- [18] P. Peran *et al.*, “Isu dan Masalah Keuangan Negara Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Lansia: Evaluasi Dampak Empirik dan Implikasi Kebijakan Pengaruh Keterbukaan Perdagangan, Foreign Direct Investment,

- dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Per Kapita Negara-Negara ASEAN,” pp. 76–94.
- [19] “Impact of Trade Openness on Tax Revenue in Nigeria,” *Journal of Economics and Sustainable Development*, Aug. 2023, doi: 10.7176/jesd/14-14-01.
 - [20] K. Tsaurai, “Impact of Trade Openness on Tax Revenue in Transitional Markets,” 2024.
 - [21] A. J. Auerbach and Y. Gorodnichenko, “Measuring the output responses to fiscal policy,” *Am. Econ. J. Econ. Policy*, vol. 4, no. 2, pp. 1–27, May 2012, doi: 10.1257/pol.4.2.1.
 - [22] A. A. Haug and A. Sznajderska, “Government spending multipliers: Is there a difference between government consumption and investment purchases?,” *J. Macroecon.*, vol. 79, Mar. 2024, doi: 10.1016/j.jmacro.2023.103584.
 - [23] P. B. Saptono and G. Mahmud, “MACROECONOMIC DETERMINANTS OF TAX REVENUE AND TAX EFFORT IN SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES,” *Journal of Developing Economies*, vol. 6, no. 2, p. 253, Nov. 2021, doi: 10.20473/jde.v6i2.29439.
 - [24] SUGIONO, “METODE PENELITIAN KUANTITATIF.”
 - [25] “World Economic Outlook (October 2026) - Real GDP growth.” Accessed: Jun. 26, 2026. [Online]. Available: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/IDN/BRN/KHM/LAO/MYS/MMR/PHL/SGP/THA/VNM
 - [26] B. H. Baltagi, “Econometric Analysis of Panel Data Second edition.”
 - [27] A. Shela Septiani and U. Sastradipraja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Achmad Yani, “Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi”.
 - [28] “PROSES PENELITIAN, MASALAH, VARIABEL DAN PARADIGMA PENELITIAN”.
 - [29] T. Penulis *et al.*, *STATISTIK MULTIVARIAT DALAM RISET*. 2021. [Online]. Available: www.penerbitwidina.com
 - [30] E. O. F. Economics *et al.*, *Single-equation regression models*. 2013. .
 - [31] D. N. G. Dawn C. porter, “Basic Econometrics,” Oct. 2008.
 - [32] F. Febrian Pratama and D. S. Aisyah, “Melati & Suryowati (2018) Model Random Effects”, doi: 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10174.
 - [33] L. Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Badratun Nafis, “Pengaruh Pengungkapan Modal Intelektual Terhadap Integritas,” *JAM*, vol. 2, no. 3, 2023, doi: 10.29103/jam.v%vi%i.10990.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.